



KABUPATEN BOGOR
ISTIMEWA dan GEMILANG
KUTA UDAYA WANGSA

BerAKHLAK

#bangga
melayani
bangsa



RENCANA KERJA PERUBAHAN

Tahun 2026



Disusun oleh:

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOGOR**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2026 merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah yang memuat penyesuaian terhadap arah kebijakan, tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Melalui Perubahan Renja ini, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilaksanakan secara lebih optimal, khususnya dalam mendukung terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta perlindungan masyarakat di wilayah Kabupaten Bogor.

Kami menyadari bahwa dokumen Perubahan Renja ini masih memiliki kekurangan, baik dalam substansi maupun penyajiannya. Untuk itu, saran, masukan, dan kritik yang bersifat membangun sangat diperlukan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan dalam penyusunan dokumen perencanaan pada periode selanjutnya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan ke semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Rencana Kerja Perubahan tahun 2026 ini, Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja serta mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bogor.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOGOR,**



CECEP IMAM NAGARASID, S.E., M.Si.
NIP. 196909221997031007



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
Daftar Tabel	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	13
1.4 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026	15
2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2026	15
2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2026	17
2.3 Target Capaian SPM Urusan Trantibumlinmas Pada Satuan Polisi Pamong Praja Pada Perubahan Renja Tahun 2026.....	31
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	33
BAB IV PENUTUP	54



Daftar Tabel

Tabel 2.1. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Sampai Dengan TRIWULAN II Tahun 2026	16
Tabel 2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja s/d TRIWULAN II Tahun 2026	19
2.3 Tabel Target Capaian SPM Urusan Trantibumlinmas Satpol PP Tahun 2026	32
Tabel 3.1. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2026.....	34



LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Bupati Bogor Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026 yang ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2026 dijadikan pedoman bagi perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 dalam upaya mencapai target kinerja utama dan kinerja kunci di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja hingga akhir tahun 2026.

Secara umum, perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 telah mengacu pada hasil evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan semester I tahun 2026, menyesuaikan perubahan-perubahan penjabaran yang terjadi pada APBD Tahun Anggaran 2026, serta mengakomodir adanya perubahan-perubahan penambahan dan/atau pengurangan rincian Subkegiatan akibat adanya perubahan kebijakan daerah.

Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 akan menjadi pedoman dalam tahapan penganggaran, terutama dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2026 hingga ditetapkannya Program, Kegiatan dan Subkegiatan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang dirinci dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2026.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub

kegiatan dalam rangka mendukung penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bogor. Perubahan Renja Tahun 2026 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan kebijakan dan penganggaran daerah, khususnya adanya penyesuaian belanja.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor menyusun Perubahan Renja 2026 dengan berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 didasarkan pada substansi perubahan penjabaran III APBD Tahun Anggaran 2026, kegiatan dan sub kegiatan yang berkaitan dengan penataan pedagang kaki lima di wilayah Cibinong Raya dan Puncak. Adapun alasan perubahan Renja 2026 yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu:

1. Adanya penyesuaian belanja berdasarkan hasil realokasi hingga perubahan penjabaran III APBD tahun anggaran 2026;
2. Adanya kebijakan mandatory daerah yang telah ditetapkan untuk dicantumkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 dan dipedomani dalam Perubahan Renja PD Tahun 2026.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2026 merupakan bagian dari proses penyesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah terhadap perkembangan pelaksanaan pembangunan dan perubahan kebijakan penganggaran pada Tahun Anggaran 2026, substansi perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 mengakomodir adanya perubahan-perubahan penambahan dan/atau pengurangan rincian sub kegiatan akibat adanya perubahan target kinerja dan anggaran yang terjadi sejak ditetapkannya APBD Tahun Anggaran 2026 yang dilakukan dan tercantum dalam Perubahan Penjabaran III APBD Tahun Anggaran 2026.

Pada tahap Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah, dilakukan penyempurnaan substansi berdasarkan hasil sinkronisasi dengan kebijakan perencanaan daerah serta memperhatikan kebijakan mandatory yang telah ditetapkan untuk dicantumkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026. Tahap akhir dilakukan melalui verifikasi dan penyesuaian dokumen sehingga

Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2026 konsisten dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Di samping itu, Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 juga mempertimbangkan capaian kinerja TRIWULAN III Tahun 2026 sehingga dapat menjadi acuan dalam melakukan evaluasi terhadap rencana pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan, sehingga dapat terealisasi pada akhir tahun 2026.

Setelah melewati pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan perubahan renja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2026, ada beberapa evaluasi yang telah dilakukan sehingga diperlukan beberapa perubahan terkait program, kegiatan dan sub kegiatan terutama dalam rangka mengsucceskan visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati definitif periode tahun 2025-2030. Alasan terjadinya perubahan renja tahun 2026 dikarenakan ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh satuan polisi pamong, antara lain :

- a. Penataan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Cibinong Raya yang terdiri dari wilayah yaitu Cibinong, Citeureup, Area Gor Pakansari, Babakan Madang dan Bojonggede.
- b. Penanganan terhadap berbagai pelanggaran perda dan perkara akan terus dioptimalkan sehingga berbagai kebijakan dilakukan dengan pendekatan situasi dan kondisi kekinian seperti penanganan PKL Puncak, penertiban bangunan liar, penertiban Penyakit Masyarakat dan pelanggaran lainnya.
- c. Adanya tugas tambahan dengan pelaksanaan penegakan hukum pada kegiatan pemberantasan cukai rokok ilegal dimana anggaran mengenai program, kegiatan dan sub kegiatan ini disalurkan melalui dana DBHCHT untuk tahun anggaran 2026 kepada Satuan Polisi Pamong Praja.

Setiap tahapan pada penyusunan renja perubahan tahun 2026 ini dilakukan dengan melihat kebutuhan dan skala prioritas berdasarkan hasil evaluasi anggaran dan kinerja terhadap berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan triwulan ke II. Penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 mengacu pada Dokumen Perubahan RKPD tahun 2026 dan Rencana Strategis

(Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2025-2030.

Penyusunan perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2026 mengacu juga pada skala Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029 yaitu Asta Cita dimana Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan pemetaan Bidang urusan mengampu pada Asta Cita ke-8 yaitu : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Berdasarkan kedua Asta Cita tersebut Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan urusan Trantibumlinmas.

Selain itu perubahan Rencana Kerja tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada skala prioritas ke-6 Pembangunan Provinsi Jawa Barat yaitu : Inovasi Pelayanan Publik, Penataan Daerah dan Stabilisasi Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keamanan. Hal ini disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi pada Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Bogor.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah. Dalam upaya mencapai keberhasilan Perangkat Daerah perlu adanya perencanaan yang baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Perangkat Daerah. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor harus berkualitas dan mendukung pencapaian target indikator kinerja utama lingkup urusan Trantibumlinmas.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2026 memiliki dinamika tersendiri dengan melakukan perubahan mendasar dengan 3 (tiga) alasan, yaitu:

1. Perubahan Visi dan Misi Bupati terpilih Tahun 2025-2030.
2. Perubahan Skala Prioritas Nasional dan Skala Prioritas Provinsi Jawa Barat.

3. Penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima di wilayah Cibinong Raya dan Puncak.

Sebagai tindak lanjut penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2026, hasil perubahan program, kegiatan, sub kegiatan, target kinerja dan anggaran diselaraskan dengan Perubahan RKPD Tahun 2026, Perubahan Penjabaran III APBD, serta Rancangan Perubahan KUA-PPAS. Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, perubahan kebijakan daerah, serta kebutuhan prioritas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, termasuk penataan PKL di wilayah Cibinong Raya dan Puncak serta penanganan pelanggaran Perda dan Perkada.

Selanjutnya, dilakukan verifikasi dan sinkronisasi antara Perubahan Renja dengan Rancangan Perubahan APBD untuk memastikan kesesuaian target kinerja, indikator, volume, lokasi dan pagu anggaran. Hasil penyelarasan tersebut menjadi dasar penyempurnaan usulan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja agar pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2026 dapat berjalan efektif, efisien, terukur dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Bogor.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan pedoman Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

- Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045;
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan nasional;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 461);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentrman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Startegis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2025;
41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
44. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
45. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

- Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
49. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025- 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
 50. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Rencana Kerja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 35);
 51. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;
 52. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95 Tahun 2016);
 53. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
 54. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044;
 55. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2);
 56. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 4);
 57. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 Kabupaten Bogor adalah peraturan tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Trantibum Linmas)
 58. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 46);

59. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor.
60. Peraturan Bupati Bogor Nomor 81 Tahun 2021 tentang Tata Cara Tindakan Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah dan/ Peraturan Bupati;
61. Peraturan Bupati Bogor Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.
62. Peraturan Bupati Bogor Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 20);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, sebagai berikut :

Maksud :

Maksud disusunnya Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran dalam rangka penyusunan bahan Perubahan RAPBD tahun anggaran 2026

Tujuan :

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 adalah :

1. Mencatat perubahan yang terjadi pasca ditetapkannya APBD Tahun Anggaran 2026 yang termuat dalam perubahan penjabaran III APBD tahun anggaran 2026;
2. Menyesuaikan kinerja, indikator dan target kinerja perangkat daerah sebagai bentuk penyesuaian terhadap visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bogor untuk tahun 2026.
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah dan Perubahan APBD tahun anggaran 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2026 diuraikan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 361 ayat (3) sebagai berikut:

Bab I	: Pendahuluan
Bab II	: Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026
Bab III	: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV	: Penutup

BAB I. Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang dilakukannya perubahan Renja PD tahun 2026, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen. Bab I halaman pertama akan disusun oleh Bapperida untuk digunakan secara seragam oleh seluruh PD.

BAB II. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2026

Menguraikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, serta dituangkan pada tabel 2.1 dan tabel 2.2 (format terlampir).

Substansi Tabel 2.1 adalah menguraikan kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah beserta indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja tujuan dan sasaran. Adapun substansi Tabel 2.2 diisi dengan hasil unduhan Perubahan Renja PD Tahun 2026 yang bersumber dari SIPD.

BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja

Menjelaskan dan menguraikan perubahan rencana kerja perangkat daerah tahun 2026 yang terdapat dalam Tabel 3.1, dimana tabel ini merupakan hasil unduhan dari SIPD Perubahan Renja PD yang telah diinput. Narasi pada Bab ini mencakup perubahan yang telah ditentukan secara mandatory dan termuat dalam SIPD.

BAB IV. Penutup

Bab ini berisi hal-hal yang dianggap penting untuk menjadi perhatian pada tahapan selanjutnya pasca penyusunan Perubahan Renja PD tahun 2026. Bab Penutup ditandatangani oleh Bupati Bogor, dan diseragamkan untuk semua PD.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2026

Berdasarkan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 – 2029, pada tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor menetapkan tujuan yaitu Terwujudnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub urusan trantibumlinmas dengan menetapkan sasaran yaitu Terwujudnya Penegakan Perda dan Perkada dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kewenangan Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran ini menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 – 2030. Berikut adalah target indikator yang mejadi Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 – 2030 sebagai berikut:

1. Indeks Penyelenggaraan Tramtibum dan Satlinmas dengan Target Kinerja 76 poin pada tahun 2026.
2. Indeks Penegakan Perda dan Perkada dengan Target Kinerja 76 poin pada tahun 2026.

Dalam sub bab ini akan diuraikan Capaian kinerja tujuan dan sasaran, tahun 2026 dengan menyajikan indikator kinerja tujuan dan sasaran. Dalam bab ini juga menguraikan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2026 yang berisi Capaian kinerja tujuan dan sasaran tahun 2025 dengan menyajikan indikator kinerja tujuan dan sasaran yang penghitungannya akan disajikan di akhir tahun 2026 seperti dalam tabel berikut ini :



Tabel 2.1
EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

Urusan/Unsur : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Perangkat Daerah : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR

No	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target RENSTRA Tahun 2026	Realisasi sampai dengan TRIWULAN II Tahun 2026	Tingkat Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100	7
	TUJUAN						
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub urusan trantibumlinmas	Indeks Penyelenggaraan Tramtibum dan Satlinmas	Poin	76	-	-	Mulai dihitung pengukurannya di akhir tahun (TW IV)
	SASARAN						
1	Terwujudnya Penegakan Perda dan Perkada	Indeks Penegakan Perda dan Perkada	Poin	76	-	-	Mulai dihitung pengukurannya di akhir tahun (TW IV)

2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2026

Pada sub bab ini akan dijabarkan mengenai pengukuran capaian kinerja pada hasil pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, rata-rata tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tercatat sebesar 0,00 dengan kategori sangat rendah. Kondisi tersebut disebabkan karena pengukuran capaian IKU dilakukan pada akhir tahun, yaitu pada Triwulan IV, sehingga pada periode evaluasi saat ini belum terdapat realisasi capaian yang dapat menggambarkan kinerja akhir tahun secara keseluruhan.

Sementara itu, realisasi anggaran mencapai 53,07 persen dengan kategori rendah. Rata-rata tingkat capaian kinerja program sebesar 48,05 persen, capaian kinerja kegiatan sebesar 38,17 persen, dan capaian kinerja sub kegiatan sebesar 35,79 persen, yang seluruhnya masih berada pada kategori sangat rendah. Adapun rata-rata tingkat capaian anggaran sebesar 46,03 persen dan termasuk kategori sangat rendah. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan, dan penyerapan anggaran masih memerlukan peningkatan dan percepatan pada periode berikutnya agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja, terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong keberhasilan, antara lain telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas Satpol PP.

Selain itu, penguatan koordinasi internal di lingkungan Satpol PP serta pelaksanaan evaluasi secara berkala terhadap anggota yang bertugas di lapangan turut mendukung peningkatan efektivitas penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Keberhasilan kinerja juga didukung oleh capaian IKU Satpol PP Kabupaten Bogor pada Tahun 2025 yang menjadi salah satu yang tertinggi di Provinsi Jawa Barat dengan

predikat sangat baik, sehingga menjadi modal penting dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja pada tahun berjalan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa faktor yang menghambat pencapaian kinerja, khususnya masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam mematuhi Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), yang berdampak pada masih ditemukannya pelanggaran serta gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Di samping itu, keterbatasan anggaran sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran turut memengaruhi optimalisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan, termasuk pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan.

Sebagai tindak lanjut atas kondisi tersebut, Satpol PP Kabupaten Bogor akan meningkatkan pendekatan yang humanis kepada masyarakat serta memperkuat pemahaman mengenai tugas dan fungsi Satpol PP guna membangun kepercayaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan terhadap Perda dan Perkada. Upaya tersebut akan dilakukan melalui sosialisasi secara langsung maupun pemanfaatan media sosial dan media komunikasi lainnya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat serta menekan jumlah pelanggaran. Selain itu, Satpol PP Kabupaten Bogor akan mengusulkan penambahan dukungan anggaran sesuai dengan kebutuhan prioritas agar pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat berjalan lebih optimal serta mampu mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Berikut disampaikan tabel secara keseluruhan capaian indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dimulai dari indikator program, kegiatan sampai dengan sub kegiatan yang tertera seperti dalam tabel 2.2 berikut ini:



Tabel 2.2

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA s/d TRIWULAN II TAHUN 2026

Urusan/Unsur : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Perangkat Daerah : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2030			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2030)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d tahun 2026 (%)		Keterangan		
																I		II			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
1						2	3	4			5		6			7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6*100		13 = 11+5		14 = 13/4*100			
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
1	05					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																							
1	05	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB	Predikat	319,733,171,290	BB	42,460,452,268	BB	Predikat	41,529,016,796	10,313,631,334	11,307,730,447	0.00	21,621,361,781	0.00	52.06	-	64,081,814,049	-	20.04				
							76.7	Poin		76.5		76.7	Poin																
1	05	01	2	0		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang berkualitas	100	Persen	6,021,975,323	100	493,056,193	100	Persen	130,666,275	23	31,140,000	23	69,885,070	46	101,025,070	46.15	77.32	46	594,081,263	46	9.87	PRO LAP	
1	05	01	2	0		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37	Dokumen	629,904,917	9	29,412,500	4	Dokumen	15,337,075	1	2,580,000	1	8,233,130	2	10,813,130	50.00	70.50	2	40,225,630	5	6.39		
1	05	01	2	0		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	449,820,343	1	44,284,550	1	Dokumen	3,632,950			1	3,512,380	1	3,512,380	100.00	96.68	1	47,796,930	20	10.63		



1	05	01	20013	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen	197,662,818	1	13,567,863	1	Dokumen	3,390,150				0	-	0.00	0.00	-	13,567,863	-	6.86		
1	05	01	20014	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10	Dokumen	527,416,386	2	35,991,650	1	Dokumen	4,443,375				0	-	0.00	0.00	-	35,991,650	-	6.82		
1	05	01	20015	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10	Dokumen	226,552,420	2	18,319,440	2	Dokumen	3,471,500				0	-	0.00	0	-	18,319,440	-	8.09		
1	05	01	20016	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	Laporan	414,469,146	4	51,000,000	4	Laporan	10,138,050	2		1	3,034,350	3	3,034,350	75.00	29.93	3	54,034,350	30	13.04	
1	05	01	20017	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	2,893,396,124	1	265,589,740	12	Laporan	82,546,600	3	28,560,000	3	50,320,000	6	78,880,000	50.00	95.56	6	344,469,740	120	11.91	
1	05	01	20018	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	5	Dokumen	682,753,169	1	34,890,450	1	Dokumen	7,706,575				4,785,210	0	4,785,210	0.00	62.09	-	39,675,660	-	5.81	
1	05	01	20022	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daaerah	100	Persen	144,040,413,604	99	19,385,802,156	100	Persen	21,676,312,921	25	5,054,582,778	28	5,787,117,897	53	10,841,700,675	53.07	50.02	53	30,227,502,831	53.07	20.99	KEUANG AN
1	05	01	20021	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125	Orang	141,301,654,218	103	19,104,973,756	142	Orang	21,566,162,946	135	5,020,732,778	127	5,753,628,642	127	10,774,361,420	89.44	49.96	127	29,879,335,176	102	21.15	
1	05	01	20023	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	Dokumen	1,595,854,836	12	131,567,800	12	Dokumen	40,918,950	3	24,990,000	3	15,838,600	6	40,828,600	50.00	99.78	6	172,396,400	10	10.80	Verifikasi SPJ
1	05	01	20024	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	60	Dokumen	145,517,723	12	21,222,800	12	Dokumen	1,744,975	3		3	1,722,165	6	1,722,165	50.00	98.69	6	22,944,965	10	15.77	Dokumen LRA
1	05	01	20025	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	196,297,607	1	30,384,850	1	Laporan	2,462,000	1			2,431,720	1	2,431,720	100.00	98.77	1	32,816,570	20	16.72	Dokumen Laporan Keuangan



1	051200	010007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	60	Laporan	722,300,342	12	91,989,180	12	Laporan	61,875,550	3	8,860,000	3	13,496,770	6	22,356,770	50.00	36.13	6	114,345,950	10.0	15.83	Dokumen Laporan Keuangan Bulanan
1	051200	010008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	Dokumen	78,788,878	1	5,663,770	1	Dokumen	3,148,500					0	-	0.00	0.00	-	5,663,770	-	7.19	Laporan Prognosis
1	051200	010003	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset yang Tercatat sesuai dengan Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	Persen	279,601,350	100	11,344,883	100	Persen	5,530,773					0	-	0.00	0.00	-	11,344,883	-		UMP EG
1	051200	010003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	Dokumen	140,890,150	1	7,079,468	1	Dokumen	3,065,773					0	-	0.00	0.00	-	7,079,468	-	5.02	RP 3.06 5.77 3.50 (di sistem pagu anggaran nya diak hir ada pem bula tan "50")
1	051200	010006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Laporan	138,711,200	1	4,265,415	1	Laporan	2,465,000					0	-	0.00	0.00	-	4,265,415	-	3.08	
1	051200	010005	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Tertangani Layanan Kepegawaian Tepat Waktu	100	Persen	5,610,913,797	100	735,126,577	100	Persen	111,483,750		31,110,000		24,480,000	0	55,590,000	0.00	49.86	-	790,716,577	0	14.09	UMP EG
	051200	010002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10	Paket	4,155,544,969		622,080,000								0	-			-	622,080,000	-	14.97	
1	051200	010003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5	Dokumen	565,423,603	1	59,330,000	1	Dokumen	4,583,750					0	-	0.00	0.00	-	59,330,000	-	10.49	
1	051200	010005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5	Dokumen	179,435,225	1	27,216,577	1	Dokumen	96,900,000		31,110,000		24,480,000	0	55,590,000	0.00	57.37	-	82,806,577	-	46.15	Realisasi Kinerja diak hir Tah un
1	051200	010009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Orang	710,510,000	5	26,500,000	10	Orang	10,000,000					0	-	0.00	0.00	-	26,500,000	-	3.73	



1	05	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Umum	100	Persen	13,100,187,156	100	1,877,237,086	100	Persen	419,787,650		79,823,346		93,236,206	0	173,059,552	0.00	41.23	-	2,050,296,638	0	15.65	UMPEG
1	05	01	206	00061	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	Paket	60,686,250			2	Paket	22,252,500				0	-	0.00	-	-	-	-	0.00		
1	05	01	206	00062	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	Paket	1,441,387,282	5	192,024,854	5	Paket	102,828,550		5		5	-	100.00	-	5	192,024,854	20.0	13.32		
1	05	01	206	00064	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15	Paket	8,342,407,350	3	1,176,370,232	3	Paket	142,136,600		3	48,763,726	3	101,822,072	100.00	71.64	3	1,278,192,304	20.0	15.32		
1	05	01	206	00069	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500	Laporan	3,316,392,524	100	508,842,000	100	Laporan	152,570,000	15	26,765,000	20	44,472,480	35	71,237,480	35.00	46.69	35	580,079,480	7.0	17.49	
1	05	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan ketentuan	100	Persen	3,126,137,106			100	Persen	54,793,550		-		5,305,939,365	0	-	0.00	-	-	-	0	0.00	UMPEG
1	05	01	207	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	47	Unit	3,126,137,106			47	Unit	54,793,550				0	-	0.00	-	-	-	-	0.00		
1	05	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	143,454,227,718	100	19,004,308,974	100	Persen	18,348,617,597		5,013,049,916		5,305,939,365	0	10,318,989,281	0.00	56.24	-	29,323,298,255	0	20.44	UMPEG
1	05	01	208	00082	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	2,616,616,230	12	246,769,667	12	Laporan	336,002,400	3	50,467,228	3	50,490,556	6	100,957,784	50.00	30.05	6	347,727,451	10.0	13.29	
1	05	01	208	00084	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25	Laporan	140,837,611,488	5	18,757,539,307	5	Laporan	18,012,615,197	1	4,962,582,688	1	5,255,448,809	2	10,218,031,497	40.00	56.73	2	28,975,570,804	8.0	20.57	RP 18.0 12.6 15.1 97.5 0 (di sistem pagu anggaran nya diak hir ada pem bula tan "50")
1	05	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik	100	Persen	7,225,852,342	100	953,576,399	100	Persen	781,824,280	11	103,925,294	47	27,071,909	59	130,997,203	58.62	16.76	59	1,084,573,602	58.62068966	15.01	UMPEG



1	05	01	2009	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	56	Unit	631,853,900	56	54,612,300	56	Unit	88,500,000		20	18,981,100	20	18,981,100	35.71	21.45	20	73,593,400	35.7	11.65		
1	05	01	2009	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56	Unit	4,535,272,286	56	531,036,570	56	Unit	548,094,280	10	103,925,294	20	8,090,809	30	112,016,103	53.57	20.44	30	643,052,673	53.6	14.18	
1	05	01	2009	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	30	Unit	495,381,900	30	68,590,000	30	Unit	51,830,000				0	-	0.00	0.00	-	68,590,000	-	13.85		
1	05	01	2009	009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Unit	1,563,344,256	1	299,337,529	1	Unit	93,400,000		1		1	-	100.00	0.00	1	299,337,529	100.0	19.15		
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	Persen	64,486,104,098	100	10,708,838,737	100	Persen	1,303,601,650		307,020,000	50	801,501,836	50.00	1,108,521,836	50.00	85.04	50	11,817,360,573	50.00	18.33	
						Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Linmas	100	Persen		97		100	Persen				66.55		66.55			67		67			
						Persentase Pemberdayaan Anggota Satpol PP	100	Persen		100		100	Persen				73.70		73.70			74		74			
						Persentase Penegakan Perda dan Perkada	100	Persen		100		100	Persen				50		50.00			50		50			
1	05	02	2001		Penanganan Gangguan Ketentrman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentrman dan Ketertiban Umum	100	Persen	54,717,339,262	100	9,352,977,415	100	Persen	1,102,841,200	31	235,450,000	41	683,992,056	72	919,442,056	71.75	83.37	72	10,272,419,471	71.75	18.77	
						Persentase Anggota Satpol PP yang telah memperoleh Pelatihan dan Pembinaan	100	Persen		100		100	Persen				73.70		74		73.70		74		73.70		
						Persentase Anggota Satlinmas yang telah ditingkatkan kapasitasnya	100	Persen		97		100	Persen				66.55		67		66.55		67		66.55		
1	05	02	2001	003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentrman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentrman, Kertertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	10	Dokumen	3,182,500,401	2	242,314,600	2	Dokumen	63,515,725		23,800,000	1	39,558,150	1	63,358,150	50.00	99.75	1	305,672,750	10	9.60	



1	052014	000000	20004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10	Dokumen	4,061,617,754	2	487,669,960	2	Dokumen	68,211,275		26,520,000		41,501,526	0	68,021,526	0.00	99.72	-	555,691,486	-	13.68	
1	052015	000000	20005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	563	Orang	2,983,352,475	563	528,138,175	521	Orang	107,671,800	65	21,420,000	136	44,867,900	201	66,287,900	38.58	61.56	201	594,426,075	35.7	19.92	
1	052015	000000	20015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan.	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	60	Laporan	4,032,661,370	12	641,482,330	12	Laporan	43,614,100	3	15,980,000	3	27,634,100	6	43,614,100	50.00	100.00	6	685,096,430	10.0	16.99	Realisasi Anggaran pas 100 % karena isinya Peradilan , dan ATK Nilainya kecil jadi tidak melakuk an penawaran harga
1	052016	000000	20016	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	60	Laporan	26,206,108,040	12	5,872,248,350	12	Laporan	474,537,225	3	147,730,000	3	324,629,330	6	472,359,330	50.00	99.54	6	6,344,607,680	10.0	24.21	
1	052017	000000	20017	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	60	Laporan	14,251,099,222	12	1,581,124,000	12	Laporan	345,291,075	3		3	205,801,050	6	205,801,050	50.00	59.60	6	1,786,925,050	10.0	12.54	
1	05202	000000	2002	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang tertangani sesuai SOP yang berlaku	100	Persen	9,768,764,836	100	1,355,861,322	100	Persen	200,760,450		71,570,000	50	117,509,780	50.00	189,079,780	50.00	94.18	50	1,544,941,102	50	15.82	



1	0	0	2	0	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai SOP	60	Laporan	3,740,908,765	12	382,280,910	12	Laporan	81,231,725	3	34,680,000	3	36,720,000	6	71,400,000	50.00	87.90	6	453,680,910	10	12.13	
1	0	0	2	0	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	60	Laporan	6,027,856,071	12	619,885,270	12	Laporan	119,528,725	3	36,890,000	3	80,789,780	6	117,679,780	50.00	98.45313752	6	737,565,050	10	12.24	
Jumlah Program						2								42,832,618,446		10,620,651,334		12,109,232,283		22,729,883,617							
Jumlah Kegiatan						10													%	Predikat							
Jumlah Sub Kegiatan						38									RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)			0.00	Sangat Rendah								
															REALISASI ANGGARAN			53.07	RENDAH								
															RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM (OUTCOME/INDIKATOR PROGRAM)			48.05	SANGAT RENDAH								
															RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA KEGIATAN (OUTPUT/ KELUARAN KEGIATAN)			38.17	SANGAT RENDAH								
															RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (OUTPUT/ KELUARAN KEGIATAN)			35.79	SANGAT RENDAH								
															RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN			46.03	SANGAT RENDAH								



LAMPIRAN RUMUS HITUNG KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KINERJA	INDIKATOR	RUMUS	KETERANGAN
A	Tujuan			
	Terwujudnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub urusan trantibumlinmas	Indeks Penyelenggaraan Tramtibum dan Satlinmas	$(\text{Bobot trantibum} \times \text{nilai indeks trantibum}) + (\text{bobot satlinmas} \times \text{nilai indeks satlinmas}) / 0,5$ (Batas tertinggi niali kedua indeks)	Pengampu Kasat Pol PP
B	Sasaran			
	Terwujudnya Penegakan Perda dan Perkada	Indeks Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Indikator Penegakan Perda dan Perkada / Jumlah aspek kebijakan (3 Kebijakan)	Pengampu Kasat Pol PP
I	Program			
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Pelanggaran Gangguan Trantibum yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran Trantibum yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi}} \times 100$	Kabid Ketertiban Umum
		Persentase Pemberdayaan Anggota Satpol PP	$\frac{\text{Jumlah Anggota Satpol PP yang dilatih dan dibina}}{\text{Jumlah anggota satpol pp}} \times 100$	Kabid Pembinaan
		Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Linmas	$\frac{\text{Jumlah anggota linmas yang memperoleh pembinaan}}{\text{Jumlah target keseluruhan anggota linmas yang akan dilatih}} \times 100$	Kabid perlindungan Masyarakat
		Persentase Penegakan Perda dan Perkada	$\frac{\text{Jumlah perda dan perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah Keseluruhan perda/perkada yang memuat sanksi}} \times 100$	Kabid Pengakan peratturan perundang-undangan daerah
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Penilaian terhadap predikat SAKIP perangkat daerah yang dikeluarkan oleh inspetorat	Sekretaris
II	Kegiatan			
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	$\frac{\text{Jumlah target kegiatan penanganan pelanggaran gangguan trantibum}}{\text{jumlah seluruh kegiatan penanganan gangguan trantibum}} \times 100$	Kabid Ketertiban Umum, Kasi Pengendalian Operasional dan Kasi Ketentraman Masyarakat
2		Persentase Anggota Sat Pol PP yang telah memperoleh Pelatihan dan Pembinaan	$\frac{\text{Jumlah anggota sat pol pp yang memahami materi pelatihan dan pembinaan}}{\text{Jumlah anggota yang mengikuti pelatihan dan pembinaan}} \times 100$	Kabid Pembinaan, Kasi PSDA dan Kasi Deteksi Dini
3		Persentase anggota satlinmas yang telah ditingkatkan kapasitasnya	$\frac{\text{Jumlah anggota linmas yang memahami materi pelatihan}}{\text{jumlah anggota linmas yang dilatih}} \times 100$	Kabid Perlindungan Masyarakat, Kasi Pelatihan Kelinmasan dan Kasi Data, Informasi dan Mobilisasi Linnmas



4	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase pelanggaran perda dan perkara yang tertangani sesuai SOP	Jumlah pelanggaran perda dan perkara yang ditangani ----- x 100 jumlah pelanggaran perda dan perkara yang dilaporkan dan teridentifikasi	Kabid Pengeakan Perundang-undangan daerah, Kasi Penegakan dan Kasi Penyelidikan
5	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang berkualitas	Jumlah dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja PD yang disusun ----- x 100 jumlah dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja PD	Sekretaris dan Kasubag Program dan Pelaporan
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daaerah	Jumlah anggaran yang terealisasi ----- x 100 Jumlah pagu anggaran	Sekretaris dan Kasubag Keuangan
7	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase aset yang tercatat sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah	Barang Milik Daerah yang Tercatat ----- x 100 Jumlah Barang Milik Daerah	Sekretaris dan Kasubag Umum dan Kepegawaian
8	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian tepat waktu	Layanan Administrasi Kepegawaian yang Tertangani Tepat Waktu ----- x 100 Layanan Administrasi Kepegawaian yang Tertangani	Sekretaris dan Kasubag Umum dan Kepegawaian
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya jasa pelayanan administrasi umum	Jasa Pelayanan Administrasi Umum yang Terpenuhi -----x 100 Jasa Pelayanan Administrasi Umum yang Ditargetkan	Sekretaris dan Kasubag Umum dan Kepegawaian
10	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi/ Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah x 100	Sekretaris dan Kasubag Umum dan Kepegawaian
11	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan ketentuan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi sesuai dengan Ketentuan -----x 100 Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana	Sekretaris dan Kasubag Umum dan Kepegawaian
12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Terpelihara -----x 100 Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dimiliki	Sekretaris dan Kasubag Umum dan Kepegawaian
III	Sub Kegiatan			
1	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah target kegiatan penanganan pelanggaran gangguan trantibum / jumlah seluruh kegiatan penanganan gangguan trantibum x 100	Kasi Pengendalian Operasional
2	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Kasi Ketentraman Masyarakat
3	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kasi PSDA



4	Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kasi PSDA
5	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kasi Deteksi Dini
6	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kasi Kasi Data, Informasi dan Mobilisasi Linnmas
7	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kasi Pelatihan Kelinmasan
8	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Kasi Penyelidikan
9	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kasi Penyelidikan
10	Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	Kasi Penyelidikan
11	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kasi Penegakan
12	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kasubag Program dan Pelaporan
13	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kasi Pelatihan Kelinmasan
14	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kasi Penyelidikan



15	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Kasi Penyelidikan
16	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kasi Penyelidikan
17	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kasi Penegakan
18	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kasubag Keuangan
19	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
20	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
21	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
22	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
23	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kasubag Umum dan Kepegawaian
24	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
25	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
26	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	
27	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
28	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
29	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	
30	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kasubag Umum dan Kepegawaian



31	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
32	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
33	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
34	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
35	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
36	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
37	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
38	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
39	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
40	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

Pagu Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 sebesar **Rp. 42.832.618.446,-** terdiri dari Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar **Rp. 1.303.601.650,-** dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp. 41.529.016.796,-** . Berdasarkan laporan Evaluasi Anggaran dan Kinerja pada Triwulan II tahun 2026, telah terealisasi sebesar **RP. 22.729.883.617,-** (53,07%) dengan realisasi Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum **RP. 1.108.521.836,-** (85,04%) dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota **RP. 21.621.361.781,-** (52,06%). Untuk realisasi anggaran dan kinerja pada kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat tabel 2.2.

2.3 Target Capaian SPM Urusan Trantibumlinmas Pada Satuan Polisi Pamong Praja Pada Perubahan Renja Tahun 2026

Pada perubahan Renja Tahun 2026 target capaian SPM mengalami perubahan target, hal ini didasarkan pada kemampuan anggaran pada perangkat daerah dan kemampuan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Bogor, tetapi target-target pada SPM untuk urusan trantibumlinmas tetap dioptimalkan karena urusan SPM sebagai bagian dari urusan wajib pelayanan dasar. berikut disampaikan tabel tentang target capaian SPM pada perubahan anggaran tahun 2026 pada sat pol PP sebagai pengampu urusan trantibumlinmas.



2.3 Tabel Target Capaian SPM Urusan Trantibumlinmas Satpol PP Tahun 2026

NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS AWAL	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS PERUBAHAN
E1	SATUAN POLISI DAN PAMONG PRAJA (TRANTIBUM)						
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Yang Harus Dilayani		orang	2500	2500	2000
		1	Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	Unit	149	149	141
		2	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)	Dokumen	1	1	1
		3	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	Orang	455	455	455
		4	Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan BPKAD serta perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	1	1	1
		5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda/Perkada)	Orang	3	3	2
		6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik akibat penegakan Perda/Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat)	Orang	2	2	2



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Perubahan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 didasarkan pada beberapa kebijakan mengakomodir kebutuhan yang berkaitan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, antara lain :

Pemenuhan Gaji ke-13 dan ke-14 PPPK Paruh Waktu : Penambahan anggaran sebesar Rp.1.347.200.000 diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 bagi PPPK Paruh Waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut disampaikan usulan perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja pada dokumen Perubahan Renja tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini:

TABEL 3.1
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026

Urusan/Unsur : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Perangkat Daerah : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Be rkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							47.864.196.691	45.266.514.827	48,809,664,747	945,468,056							57.260.290.272	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							47.864.196.691	45.266.514.827	48,809,664,747	945,468,056							57.260.290.272	
	1 0 5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							47.864.196.691	45.266.514.827	48,809,664,747	945,468,056							57.260.290.272	
1 0 5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	-					-	43.651.544.779	42.659.299.997	44,073,783,297	422,238,518					Satuan Polisi Pamong Praja		53.578.995.225	



01	DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
10501201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang berkualitas				-	100 Persen	747.848.046	260.837.000	323,930,375	-423,917,671							0	
1050120001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	4 Dokumen	85.578.225	32.390.575	15,337,075	-70,241,150	Kab. Bogor, Cibinong, Tengahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1050120002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.110.046	7.200.800	3,632,950	-1,477,096	Kab. Bogor, Cibinong, Tengahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1050120003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.930.000	6.862.150	3,390,150	-1,539,850	Kab. Bogor, Cibinong, Tengahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
105012001	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.930.000	8.991.025	4,443,375	-486,625	Kab. Bogor, Cibinong, Tengahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama	2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



	0 0 0 4													untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.					
	1 . 0 5 . 0 1 . 2 . 0 1 . 0 0 0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	31.023.025	6.946.500	3,471,500	-27,551,525	Kab. Bogor, Cibinong, Tengahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0
	1 . 0 5 . 0 1 . 2 . 0 1 . 0 0 0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	58.410.750	16.149.550	75,137,750	16,727,000	Kab. Bogor, Cibinong, Tengahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0
	1 . 0 5 . 0 1 . 2 . 0 1 . 0 0 0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	456.322.500	169.171.750	205,796,600	-250,525,900	Kab. Bogor, Cibinong, Tengahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0
	1 . 0 5 . 0 1 . 2 . 0 1 . 0 0 0 8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	101.543.500	13.124.650	12,720,975	-88,822,525	Kab. Bogor, Cibinong, Tengahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0
	1 . 0 5 . 0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daaerah				-	100 Persen	21.173.530.108	21.727.410.696	21,742,952,746	569,422,638						22.666.795.225	



	1																			
	2																			
	0																			
	2																			
	1																			
	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				142 Orang/bulan	142 Orang/bulan	21.110.796.358	21.566.162.946	21,566,162,946	455,366,588	Kab. Bogor, Cibinong, Tengahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			22.000.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	5																			
	0																			
	1																			
	2																			
	0																			
	0																			
	0																			
	1																			
	1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	28.560.000	82.096.200	107,558,950	78,998,950	Kab. Bogor, Cibinong, Tengahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			400.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	5																			
	0																			
	1																			
	2																			
	0																			
	0																			
	0																			
	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	8.160.000	3.598.750	1,744,975	-6,415,025	Kab. Bogor, Cibinong, Tengahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			43.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1																			
	0																			
	5																			
	0																			
	1																			
	2																			
	0																			
	2																			
	0																			
	0																			
	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.990.000	4.970.950	2,462,000	-4,528,000	Kab. Bogor, Cibinong, Tengahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			60.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



1 . 0 5 . 0 1 . 2 . 0 2 . 0 0 0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	6.187.500	64.591.525	61.875,375	55,687,875	Kab. Bogor, Cibinong, Tengahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			150.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 . 0 5 . 0 1 . 2 . 0 2 . 0 0 0 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	12.836.250	5.990.325	3,148,500	-9,687,750	Kab. Bogor, Cibinong, Tengahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			13.795.225	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 . 0 5 . 0 1 . 2 . 0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase aset yang tercatat sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah				-	100 Persen	10.784.900	10.784.900	5,530,773	-5,254,127							55.000.000	
1 . 0 5 . 0 1 . 2 . 0 3 . 0 0 0 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.854.900	5.854.900	3,065,773	-2,789,127	Kab. Bogor, Cibinong, Tengahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			27.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 . 0 5 . 0 1 . 2 . 0 3 . 0 0 0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.930.000	4.930.000	2,465,000	-2,465,000	Kab. Bogor, Sumedura, Kecamatan Keludesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat	2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			27.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



06														yang adil dan makmur.					
10501205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian tepat waktu				-	100 Persen	182.472.500	222.967.500	232,863,750	50,391,250							715.000.000	
105012050002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	144.295.000	0	-	-144,295,000	Kab. Bogor, Cibinong, Tengahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			495.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
105012050003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	9.167.500	9.167.500	4,583,750	-4,583,750	Kab. Bogor, Semu a Kcamatan , Semu a Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			55.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
105012050005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	9.010.000	193.800.000	218,280,000	209,270,000	Kab. Bogor, Semu a Kcamatan , Semu a Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			55.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
105012050006	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	20.000.000	20.000.000	10,000,000	-10,000,000	Kab. Bogor, Semu a Kcamatan , Semu a Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat	2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			110.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



5 . 0 0 0 9														beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.					
1 . 0 5 . 0 1 . 2 . 0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya jasa pelayanan administrasi umum				-	100 Persen	1.078.437.700	752.049.600	1,425,747,725	347,310,025							1.938.200.000	
1 . 0 5 . 0 1 . 2 . 0 6 . 0 0 0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	2.225.250	22.252.500	22,110,000	19,884,750	Kab. Bogor, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			13.200.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 . 0 5 . 0 1 . 2 . 0 6 . 0 0 0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1.753.850	205.657.100	141,293,625	139,539,775	Kab. Bogor, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			220.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 . 0 5 . 0 1 . 2 . 0 6 . 0 0 0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	3 Paket	999.998.600	219.000.000	1,047,804,100	47,805,500	Kab. Bogor, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			935.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 . 0 5 . 0 1 . 2 . 0 6 . 0 0 0 2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	74.460.000	305.140.000	214,540,000	140,080,000	Kab. Bogor, Semua Kecamatan Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi	2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			770.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



060009												Kel/D esa		antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.					
10501207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan ketentuan				-	100 Persen	50.651.975	108.398.350	54,793,550	4,141,575							3.290.100.000	
105012070002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	35.328.775	0	-	-35,328,775	Kab. Bogor, Cibino ng, Tenga h	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			1.458.600.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
105012070006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	47 Unit	15.323.200	108.398.350	54,793,550	39,470,350	Kab. Bogor, Cibino ng, Tenga h	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			1.831.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
10501208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah				-	100 Persen	19.381.589.550	18.624.791.951	19,506,140,098	124,550,548							23.540.000.000	
105012080	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	336.002.400	336.002.400	310,014,063	-25,988,337	Kab. Bogor, Semu a Keca matan Semu a Kel/D esa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai	2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			440.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



0	2													masyarakat yang adil dan makmur.						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 0	5 0	19.045.587.150	18.288.789.551	19,196,126,035	150,538,885	Kab. Bogor, Cibinong, Tengahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			23.100.000.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik			-	100 Persen	1.026.230.000	952.060.000	781,824,280	-244,405,720							1.373.900.000		
1	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			81 Unit	56 Unit	88.850.000	88.500.000	88,500,000	-350,000	Kab. Bogor, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			97.900.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			81 Unit	56 Unit	642.600.000	642.630.000	548,094,280	-94,505,720	Kab. Bogor, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			715.000.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			30 Unit	30 Unit	74.460.000	74.130.000	51,830,000	-22,630,000	Kab. Bogor, Cibinong, Tengahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat	2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			165.000.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



9 . 0 0 0 6														beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.					
1 . 0 5 . 0 1 . 2 . 0 9 . 0 0 0 9	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direh abilitasi				2 Unit	1 Unit	220.320.000	146.800.000	93,400,000	-126,920,000	Kab. Bogor, Cibino ng, Tenga h	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			396.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2 . 1 . 0 5 . 0 2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan tranitibum yang dapat diselesaikan				-	100 Persen	4.212.651.912	2.607.214.830	4,735,881,450	523,229,538					Masyarakat Kabupaten Bogor		3.681.295.047	
1 . 0 5 . 0 2 . 2 . 0 1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase gangguan tranitibum yang dapat diselesaikan Persentase Pemberdayaan Anggota Satpol PP Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Linmas				-	100 Persen	3.043.362.050	2.205.693.460	4,271,841,000	1,228,478,950							3.681.295.047	
1 . 0 5 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 0 3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	8.827.250	127.046.625	170,615,725	161,788,475	Kab. Bogor, Cibino ng, Tenga h	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			1.400.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 . 0 5 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 0 4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				3 Dokumen	2 Dokumen	49.980.000	136.427.400	161,031,275	111,051,275	Kab. Bogor, Cibino ng, Tenga h	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			1.500.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



1 . 0 5 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 0 6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				-	20 Dokumen	0	0	198,938,830	198,938,830	Kab. Bogor, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DBH CUKAI HASIL TEMBAK AU (CHT) SISA DBH CUKAI HASIL TEMBAK AU (CHT)	-	2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 . 0 5 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 0 1 5	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				12 laporan	12 laporan	52.509.675	87.228.410	168,564,100	116,054,425	Kab. Bogor, Cibino ng, Tenga h	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			781.295.047	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 . 0 5 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 0 1 6	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				12 Laporan	12 Laporan	734.013.075	949.063.075	2,002,497,225	1,268,484,150	Kab. Bogor, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 . 0 5 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 0 1 7	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				12 Laporan	12 Laporan	1.798.108.300	690.583.625	1,117,284,575	-680,823,725	Kab. Bogor, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 . 0 5 . 0 2 . 2 . 0 2 . 0	Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum				-	20 Dokumen	0	0	49,026,950	49,026,950	Kab. Bogor, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	SISA DBH CUKAI HASIL TEMBAK AU (CHT)	-	2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



1 . 0 0 2 2		dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal																	
1 . 0 5 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 2 3	Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum			-	6 Dokumen	0	0	165,310,520	165,310,520	Kab. Bogor, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	SISA DBH CUKAI HASIL TEMBAK AU (CHT)	-	2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi				0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 . 0 5 . 0 2 . 2 . 0 1 . 0 0 2 5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas			525 Orang	521 Orang	399.923.750	215.344.325	284,471,800	-115,451,950	Kab. Bogor, Cibino ng, Tenga h	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi				0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 . 0 5 . 0 2 . 2 . 0 2 . 0 2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-			-	-	1.169.289.862	401.521.370	464,040,450	-705,249,412								0	
1 . 0 5 . 0 2 . 2 . 0 2 . 0 0 1 1	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP			12 Laporan	12 Laporan	595.231.262	162.463.515	201,711,725	-393,519,537	Kab. Bogor, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi				0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 . 0 5 . 0 2 . 2 . 0 2 .	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap			12 Laporan	12 Laporan	574.058.600	239.057.855	262,328,725	-311,729,875	Kab. Bogor, Semu a Kecamatan, Semu	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta	2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi				0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dengan Total Pagu APBD 2026 **RP. 47.864.196.691,-** telah terjadi perubahan anggaran akibat dari efisiensi anggaran, sehingga terjadi efisiensi menjadi **RP. 45.266.514.827,-**.

Pada perubahan renja Tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja mengusulkan perubahan anggaran untuk beberapa kegiatan yang dapat dilihat pada tabel 3.1 menjadi **RP. 48.809.664.47,-**. Pemenuhan Gaji ke-13 dan ke-14 PPPK Paruh Waktu. Untuk alasan perubahan atau penambahan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.1.



KERTAS KERJA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Urusan/Unsur : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Perangkat Daerah : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	RUMUS	SATUAN	SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / BERKURANG		ALASAN PERUBAHAN
						VOLUME	ANGGARAN (Rp)	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						47,864,196,691		48,809,664,747		945,468,056	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Penilaian terhadap predikat SAKIP perangkat daerah yang dikeluarkan oleh inspetorat	Predikat	BB	43,651,544,779	BB	44,073,783,297		422,238,518	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang berkualitas	Jumlah dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja PD yang disusun ----- x 100 jumlah dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja PD	Persen	100	747,848,046	100	323,930,375	0	-423,917,671	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	4	85,578,225	4	15,337,075	0	-70,241,150	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen	1	5,110,046	1	3,632,950	0	-1,477,096	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen	1	4,930,000	1	3,390,150	0	-1,539,850	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen	1	4,930,000	1	4,443,375	0	-486,625	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil		Dokumen	2	31,023,025	2	3,471,500	0	-27,551,525	



			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD									
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan	4	58,410,750	4	75,137,750	0	16,727,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan	12	456,322,500	12	205,796,600	0	-250,525,900	
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tersedianya Dokumen Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Dokumen	1	101,543,500	1	12,720,975	0	-88,822,525	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan PD	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	Jumlah anggaran yang terealisasi ----- x 100 Jumlah pagu anggaran	Persen	100	21,173,530,108	100	21,742,952,746	0	569,422,638	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		orang/bulan	142	21,110,796,358	142	21,566,162,946	0	455,366,588	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen	12	28,560,000	12	107,558,950	0	78,998,950	TUGAS LAINNYA UNTUK PENATAAN PKL
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen	12	8,160,000	12	1,744,975	0	-6,415,025	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan	1	6,990,000	1	2,462,000	0	-4,528,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan	12	6,187,500	12	61,875,375	0	55,687,875	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen	1	12,836,250	1	3,148,500	0	-9,687,750	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengelolaan aset yang berkualitas	Persentase aset yang tercatat sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah	Barang Milik Daerah yang Tercatat ----- x 100 Jumlah Barang Milik Daerah	Persen	100	10,784,900	100	5,530,773	0	-5,254,127	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Dokumen Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen	1	5,854,900.00	1	3,065,773.00	0	-2,789,127	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan	1	4,930,000	1	2,465,000	0	-2,465,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya layanan kepegawaian	Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian tepat waktu	Layanan Administrasi Kepegawaian yang Tertangani Tepat Waktu ----- x 100	Persen	100	182,472,500	100	232,863,750	0	50,391,250	



				Layanan Administrasi Kepegawaian yang Tertangani								
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Paket	1	144,295,000	1	-	0	-144,295,000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Dokumen	1	9,167,500	1	4,583,750	0	-4,583,750	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersedianya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen	1	9,010,000	1	218,280,000	0	209,270,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Kapasitas anggota Satpol PP Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang	10	20,000,000	10	10,000,000	0	-10,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum	Persentase terpenuhinya jasa pelayanan administrasi umum	Jasa Pelayanan Administrasi Umum yang Terpenuhi -----x 100 Jasa Pelayanan Administrasi Umum yang Ditargetkan	Persen	100	1,078,437,700	100	1,425,747,725	0	347,310,025	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket	2	2,225,250	2	22,110,000	0	19,884,750	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	5	1,753,850	5	141,293,625	0	139,539,775	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket	3	999,998,600	3	1,047,804,100	0	47,805,500	Anggaran perubahan diajukan sesuai dengan kebutuhan. Akhir triwulan 2 anggaran belanja air mineral sudah habis. Penambahan sesuai dengan anggaran murni sebelum perubahan parsial
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	100	74,460,000	100	214,540,000		140,080,000	Anggaran perubahan diajukan sesuai dengan kebutuhan. Akhir triwulan 2 anggaran belanja makanan dan minuman rapat sudah habis. Penambahan sesuai dengan anggaran murni sebelum perubahan parsial
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi sesuai dengan Ketentuan -----x 100 Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana	Persen	100	50,651,975	100	54,793,550	0	4,141,575	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Unit	1	35,328,775	1	-	0	-35,328,775	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit	47	15,323,200	47	54,793,550	0	39,470,350	



	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi ----- x 100 Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	19,381,589,550	100	19,506,140,098	0	124,550,548	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	12	336,002,400	12	310,014,063	0	-25,988,337	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	12	19,045,587,150.00	12	19,196,126,035	0	150,538,885	Kekurangan gaji PPPK PW
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berfungsinya barang milik daerah dengan baik	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Terpelihara ----- x 100 Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dimiliki	Persen	100	1,026,230,000	100	781,824,280	0	-244,405,720	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit	56	88,850,000	56	88,500,000	0	-350,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit	56	642,600,000	83	548,094,280	27	-94,505,720	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit	30	74,460,000	30	51,830,000	0	-22,630,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	1	220,320,000	1	93,400,000	0	-126,920,000	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kualitas penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai SOP yang berlaku	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Pelanggaran Gangguan Trantibum yang terselesaikan ----- x 100 Jumlah pelanggaran Trantibum yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi	Persen	100	4,212,651,912	100	4,735,881,450	100	523,229,538	
		Tercapainya kapasitas anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Linmas		Persen	100		100		100		
		Tercapainya kapasitas anggota Satpol PP	Persentase Pemberdayaan Anggota Satpol PP		Persen	100		100		100		



	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Pemberdayaan Anggota Satpol PP Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Linmas	Jumlah target kegiatan penanganan pelanggaran gangguan trantibum ----- x 100 jumlah seluruh kegiatan penanganan gangguan trantibum	Persen	100	3,043,362,050		4,271,841,000		1,228,478,950	
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		Dokumen	2	8,827,250	2	170,615,725	-	161,788,475	Karena adanya pergantian Kepala Unit Kecamatan sehingga diperlukan pelaksanaan Rapat Koordinasi Kepala Unit Kecamatan guna meningkatkan koordinasi penyelenggaraan tugas kelinmasan.
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Dokumen	2	49,980,000	2	161,031,275	-	111,051,275	Pada tahun anggaran berjalan, pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembinaan melalui metode pembinaan lapangan berbasis desa sebagai penyesuaian terhadap keterbatasan anggaran. Namun demikian, pelatihan teknis secara terpusat yang menghadirkan narasumber dan instruktur berkompeten belum dapat dilaksanakan, sehingga masih terdapat kebutuhan peningkatan kompetensi anggota Satlinmas secara terstruktur dan mendalam (mendukung SPM)
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		Dokumen	20	-	20	198,938,830	-	198,938,830	DBHCT/Cukai
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		Laporan	12	52,509,675	12	168,564,100	-	116,054,425	Penambahan anggaran untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan meningkatkan kualitas penyampaian materi terkait tindak pidana perdagangan orang
	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan		Laporan	12	734,013,075	12	2,002,497,225	-	1,268,484,150	Penambahan anggaran perjalanan dinas diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penindakan K3 (Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan) dalam rangka penataan Kawasan Cibinong Raya, mengingat alokasi anggaran yang tersedia belum mencukupi kebutuhan operasional hingga akhir tahun anggaran.
	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak	Tersedianya Pelayanan dasar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan		Laporan	12	1,798,108,300	12	1,117,284,575	-	-680,823,725	Penambahan anggaran diproyeksikan untuk mendukung

[illegible]

BAB IV PENUTUP

Demikian perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 ini disusun, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari substansi Perubahan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2026. Sebagai dokumen yang akan digunakan dalam evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tahun 2026, perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 telah memuat substansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Substansi perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 telah tercantum dalam SIPD dan akan menjadi bahan pengukuran keberhasilan pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2026 sebagai bagian dari pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bogor tahun kedua pada periode perencanaan jangka menengah tahun 2025-2029.

Selanjutnya, perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 menjadi pedoman dalam pelaksanaan proses penganggaran dan pelaksanaan kinerja hingga akhir tahun 2026.

